

SUMBANGAN PEMBARUAN ISLAM KEPADA PEMBANGUNAN

Oleh Tarmidzi Taher

Tema “Sumbangan Pembaruan Islam kepada Pembangunan di Indonesia”—yang diberikan kepada saya tentu saja merupakan suatu tema penting, yang akan berusaha melihat antara kaitan dan sumbangan pembaruan Islam kepada pembangunan nasional di Indonesia.

Sebelum berbicara lebih jauh, ada baiknya kita dudukkan dulu pengertian atau apa yang kita maksudkan dengan ungkapan “Pembaruan Islam”, kita memiliki pengertian yang sama. Istilah “Pembaruan Islam” dalam terminologi Islam sering disebut sebagai ahli “*tajdîd*” yang secara sederhana berarti “Pembaruan” (*renewal*), atau *islâh*, yakni “perbaikan” (*reform*). Terlepas dari perbedaan-perbedaan kecil di antara *tajdîd* dan *islâh*, keduanya mengandung esensi yang sama, yaitu kajian dan refleksi ulang atas pemahaman, interpretasi terhadap Islam, dan cara kerja lembaga-lembaga Islam untuk menemukan pemahaman, interpretasi baru, dan lembaga-lembaga Islam yang lebih relevan dan kontekstual dengan situasi dan tantangan kontemporer.

Dengan mempertimbangkan pengertian itu, maka persoalannya kemudian adalah apakah Islam boleh dan bisa diperbarui? Jawaban atas pertanyaan ini dapat diberikan pada dua tingkatan: pertama pada tingkat doktrin, dan kedua pada tingkat sosiologi.

Pada tingkat doktrin, sumber-sumber pokok ajaran Islam, khususnya al-Qur’an sesungguhnya sangat mendorong dan mem-

beri semangat kepada kaum Muslimin, khususnya para pemikir, untuk senantiasa melakukan upaya-upaya pembaruan pemikiran. Hal ini misalnya bisa dilihat dari kebanyakan ayat-ayat al-Qur'an sendiri. Sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an, kecuali yang berkenaan dengan subjek tauhid dan syari'ah, disampaikan Allah *swt* dalam bentuk garis besar, sehingga hanya merupakan pedoman pokok saja. Ayat-ayat seperti ini terutama berkenaan dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Dengan karakter garis besar tadi, maka al-Qur'an memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umatnya untuk mengembangkan berbagai konsep dalam berbagai lapangan kehidupan tadi, untuk kemudian melakukan reinterpretasi dan rekontekstualisasi secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan tantangan zaman.

Kemudian, pada tingkat sosiologis masyarakat (termasuk umat Islam) dan lingkungan peradabannya mengalami perubahan yang konstan. Perubahan itu tidak selalu linear berupa kemajuan (*progress*), tetapi juga berupa kemunduran (*regress*). Perubahan, apakah kemajuan atau kemunduran, bahkan sering disebut para ahli sebagai suatu sunnatullah, keharusan hukum alam yang tidak bisa dielakkan masyarakat manusia dan peradabannya. Dalam perubahan yang kontinyu dan konstan itu, maka masyarakat manusia secara alamiah melakukan seleksi terhadap pandangan dunia, cara berpikir, nilai-nilai, dan lembaga-lembaga sosialnya. Mereka mempertahankan dan mengembangkan semua yang relevan dan kontekstual, sementara meninggalkan semua yang tidak relevan dan tidak kontekstual lagi dengan kebutuhan zaman.

Islam sebagai wahyu yang diturunkan kepada manusia memang bersifat absolut. Al-Qur'an sebagai wahyu, dengan demikian, tidak berubah dan tidak boleh diubah. Meskipun demikian, ayat-ayat tertentu, sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditafsir ulang dan dikontekstualisasi secara terus-menerus guna mendapatkan rumusan dan konsepsi baru. Apalagi, Islam sebagai suatu realitas historis yang hidup di tengah masyarakat manusia juga membentuk

pandangan dunia, cara berfikir, sistem nilai, dan peradaban Muslim. Sebab itulah pandangan dunia, cara berfikir sistem nilai, dan peradaban di lingkungan masyarakat Muslim tertentu dan di masa tertentu pula bersifat relatif dan, dengan demikian, memerlukan perubahan dan pembaruan agar tetap relevan dan kontekstual dengan perjalanan waktu.

Urgensi pembaruan dalam Islam, lebih jauh lagi dapat dilihat dari tradisi Sunni klasik, yang memegang pendapat Tuhan mengutus seorang *mujaddid* (pembaru) setiap akhir seratus tahun guna memperbarui agama-Nya. Pada setiap abad dalam sejarah Islam klasik dan abad pertengahan terdapat sejumlah ulama dan pemikir yang disebut berbagai sumber sebagai *mujaddid* pada masanya. Pandangan seperti ini secara implisit mengakui bahwa Islam yang dianut dan dilaksanakan kaum Muslimin bisa mengalami kemunduran tertentu, apakah dalam segi akidah maupun dalam pengamalannya sehingga memerlukan *mujaddid* untuk memulihkannya kembali.

Tuntutan bagi pembaruan Islam lebih menemukan momentumnya ketika kaum Muslimin berhadapan dengan tantangan penjajah, sosial, kultural, dan intelektual Barat, khususnya sejak abad ke-19. Keberhasilan Barat dalam menegakkan dominasi dan hegemoninya dalam berbagai aspek kehidupan kaum Muslimin telah menghentak kesadaran kepada pemikir Muslim. Dan ini pada gilirannya mendorong mereka untuk merenungkan kembali ajaran-ajaran dan lembaga-lembaga Islam pada masa mereka masing-masing. Dari proses inilah para pembaru seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Sayyid Amir Ali dan lain-lain sampai pada kesimpulan bahwa pembaru pemikir dan kelembagaan Islam perlu dilakukan jika ingin Islam bertahan. Pembaruan perlu dilakukan bukan hanya untuk menjawab tantangan Barat, tetapi lebih penting lagi, untuk mengangkat harkat kaum Muslimin; mengeluarkan mereka dari kemunduran dan keterbelakangan dan, sebaliknya, mengantarkan mereka kepada kemajuan.

Pembaruan pemikiran dan kelembagaan Islam sampai batas ini secara garis besar mengambil dua bentuk yang bisa tumpang-tindih satu sama lainnya. *Pertama*, pembaruan dalam bentuk pemurnian pemikiran dan praktik-praktik keislaman. Dasar pemikiran di balik pembaruan seperti ini adalah bahwa kemunduran dan keterbelakangan kaum Muslimin dan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi tantangan Barat disebabkan pemikiran dan praktik-praktik keislaman mereka sudah tidak murni lagi; telah bercampur dengan bidah, khurafat dan takhayul. Solusinya adalah bahwa kaum Muslimin harus kembali kepada pemikiran dan praktik-praktik keislaman murni, sebagaimana dipegangi dan dijalankan oleh Nabi Muhammad *saw* dan para sahabatnya (kaum Salaf).

Bentuk *kedua* adalah pembaruan kelembagaan Islam. Ini dilakukan dengan mengadopsi bentuk-bentuk kelembagaan modern tertentu lengkap dengan metode-metodenya dan cara kerjanya. Pembaruan seperti ini dilandasi dengan pemikiran bahwa kemunduran dan keterbelakangan kaum Muslimin disebabkan kenyataan bahwa lembaga-lembaga Islam, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum, sudah ketinggalan zaman sehingga tidak mampu lagi merespon tantangan dan kebutuhan masyarakat. Atas dasar pemikiran inilah, maka pembaru Muslim di masa modern mengambil inisiatif dan melakukan upaya-upaya untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan modern Islam, khususnya dalam bidang pendidikan, politik, kebudayaan, hukum, dan sebagainya. Dengan memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan dan pengembangan institusi-institusi modern tersebut, maka apa yang sebenarnya terjadi adalah modernisasi kelembagaan Islam.

Pembaruan pemikiran dan kelembagaan Islam di kalangan kaum Muslimin Indonesia menemukan momentumnya sejak awal abad ini. Momentum itu dimulai dengan intensifikasi Islam berkat semakin meningkatnya kontak antara kawasan Indonesia dengan Timur Tengah sejak akhir abad ke-19, di mana semakin banyak jamaah haji Indonesia yang kembali dari Timur Tengah dengan

membawa pemikiran-pemikiran baru tidak hanya tentang Islam itu sendiri, tetapi juga tentang kelembagaan kaum Muslimin. Dari sinilah kita bisa melihat kemunculan pemikiran pembaruan dan sekaligus lembaga-lembaga baru, seperti terlihat misalnya dalam penerbitan jurnal-jurnal atau majalah baru yang penuh dengan semangat pembaruan.

Pada saat yang hampir bersamaan, dalam skala yang lebih luas, gerakan pembaruan dalam bidang pemikiran dan kelembagaan Islam di Indonesia semakin kuat dengan kemunculan organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini mengorientasikan pembaruannya kepada pemurnian pemikiran dan praktik-praktik Islam, khususnya dalam bidang pendidikan dakwah, penyantunan sosial, dan lain-lain. Pembaruan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik diprakarsai oleh Syarikat Islam. Organisasi ini pada intinya bertujuan untuk memperbaiki dan membangun kembali kekuatan ekonomi dan politik umat; karena kemajuan dalam kedua bidang ini diyakini sangat instrumental dalam upaya mengangkat harkat dan memajukan kaum Muslimin.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru dalam beberapa dasawarsa terakhir pada dasarnya sama dengan modernisasi dalam berbagai lapangan kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi, untuk terlaksananya dan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan dengan baik diperlukan sejumlah prakondisi tertentu, yang sering disebut para ahli modernisasi sebagai “prasyarat kultural”, yang juga mencakup pandangan dunia dan kelembagaan yang bersumber dari agama.

Dalam kaitan itu, sebagai contoh saja, keberhasilan pembangunan memerlukan pandangan dunia keagamaan dalam bidang kalam, yang mampu mendorong dan menggerakkan kemunculan prakarsa, inisiatif dan kemauan keras untuk meningkatkan amal karya para penganutnya. Pandangan dunia ini biasa disebut ahli sebagai “etos kerja”, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kemajuan sosial dan ekonomi. Pemikiran Islam seperti ini tentu saja sangat kondusif bagi pembangunan atau modernisasi. Sebaliknya,

pemikiran Islam yang cenderung fatalistik akan melemahkan etos kerja dan, dengan demikian, tidak mendukung upaya-upaya pembangunan dan modernisasi.

Sejak program pembangunan dilancarkan pemerintah, saya melihat bahwa cukup banyak pemikir Islam Indonesia, termasuk di antaranya saudara Dr. Nurcholish Madjid, telah memberikan perhatian besar dan intens kepada pengembangan pemikiran dan kelembagaan Islam yang sangat kondusif bagi pembangunan nasional kita. Saya menyadari bahwa terdapat kontroversi dalam aspek-aspek tertentu pemikiran pembaruan yang mereka tawarkan. Tetapi kontroversi dan perbedaan pendapat itu adalah wajar saja dan bahkan kontroversi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengujian dan pematangan suatu gagasan. Semua merupakan dinamika yang tak terelakkan dari pembaruan itu sendiri. ❖